

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan menjalankan roda pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan yang terpadu bagi masyarakat. salah satu cara untuk menyejahterakan masyarakat adalah dengan melakukan peningkatan terhadap perkembangan perekonomian yaitu dengan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam mengelola keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu tata perencanaan pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, hal demikian dapat dijadikan dasar penilaian penerapan efektivitas dari pelaksanaan perencanaan. Dengan demikian, pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan dari hasil pelaksanaan APBD dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan program serta kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk mengembangkan kesejahteraan serta pelayanan terhadap publik.

Untuk menerapkan serta mengendalikan, memeriksa dan mengawasi sebagai bentuk dari tanggungjawab yang mempengaruhi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Maka bentuk pertanggungjawaban anggaran terhadap perencanaan APBD sangat penting, karena hal tersebut akan

mempengaruhi kinerja serta akuntabilitas keuangan. Karena lembaga ataupun instansi memiliki kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dengan membuat serta menyusun laporan anggaran berupa Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 1.1

Realisasi Anggaran Belanja kecamatan Bekasi Utara Tahun 2017-2019

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Persentase) %
2017	48.328.107.000	43.130.173.929	89,24
2018	56.259.049.100	54.318.112.000	96,53
2019	39.942.687.425	36.913.710.964	92,42

(Sumber: Dana APBD Kecamatan Bekasi Utara, Diolah Oleh Penulis)

Dapat dilihat berdasarkan pada data diatas tahun 2017 realisasi anggaran belanja mencapai 89,24%, sedangkan pencapaian realisasi anggaran belanja pada tahun 2018 mencapai 96,53% terjadi kenaikan realisasi anggaran sebesar 7,29%. Pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan dengan pencapaian realisasi anggaran belanja tahun 2018 mencapai 96,53% sedangkan pencapaian realisasi anggaran belanja 2019 mencapai 92,42% terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 4,11%.

Kecamatan Bekasi Utara merupakan Instansi pemerintah daerah yang tidak terlepas dari tanggungjawab penerapan anggaran dan dari penglihatan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan. Adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

yang dapat dijadikan dasar pengukuran akuntabilitas keuangan dalam mengelola anggaran agar lebih efektif. Pengukuran tersebut didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan penyerapan anggaran rencana tingkat capaian yang semakin baik begitu pun sebaliknya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dalam penyerapan belanja langsung masih belum terealisasi secara maksimal karena adanya revisi dalam perencanaan anggaran, pembatasan kegiatan dalam perencanaan dan masih kurang ahlinya Sumber Daya Manusia (SDM). Berikut ini adalah Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2017-2019.

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2017	40.342.374.000	33.956.120.636	84,16
2018	41.276.171.100	36.998.533.895	89,63
2019	12.747.830.425	11.404.384.004	87,58

(Sumber: LKIP Kecamatan Bekasi Utara, Diolah Oleh Penuli)

Dari table diatas terlihat peningkatan serta penurunan persentase realisasi anggaran. Pada tahun 2017 realisasi anggaran belanja langsung mencapai 84,16%, dalam prosesnya dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dengan pencapaian realisasi sebesar 89,63%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 2,05% dengan jumlah penyerapan sebesar 87,58%.

Tabel 1.3**Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung**

No	Uraian	Anggaran			Realisasi Anggaran			Realisasi (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.328.325.000	8.669.669.100	9.133.655.525	3.683.809.460	8.297.114.063	8.605.572.704	85	95	94,2
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	983.577.000	437.108.000	531.833.500	663.338.663	309.402.336	178.981.300	67	70	33,6
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	225.000.000	0	20.000.000	211.429.000	0	0	93	0	0
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	91.500.000	36.000.000	30.000.000	61.380.113	22.808.832	0	67	63	0
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	33.663.972.000	31.692.014.000	2.461.200.000	28.369.742.900	27.826.387.000	2.461.200.000	84,3	87	100
6	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	250.000.000	200.000.000	571.141.400	240.265.000	0	158.630.000	96	0	27,7
7	Program Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	800.000.000	240.780.000	0	726.155.500	214.516.000	0	90,7	89	0

(Sumber: LKIP Kecamatan Bekasi Utara, Diolah Oleh Penulis)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat anggaran belanja langsung kegiatan, pada program pelayanan administrasi perkantoran tahun 2017 mencapai realisasi 85% dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 dengan mencapai realisasi 95%, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan realisasi 94,2%. Paada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2017 mencapai realisasi 67% dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dengan realisasi mencapai 70% namun pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan dengan realisasi anggaran 33,6%. Pada program peningkatan disiplin aparatur pada tahun 2017 mencapai realisasi 93%, dan pada dua tahun berikutnya tidak terlaksana. Pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pada tahun 2017 realisasi mencapai 67%, mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan realisasi mencapai 63%, dan pada tahun 2019 tidak terlaksana. Program peningkatan partisipasi masyarakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2017 mencapai realisasi 84,3%, tahun 2018 mencapai realisasi 87%, dan pada tahun 2019 mencapai 100%. Pada program peningkatan

pelayanan masyarakat pada tahun 2017 mencapai realisasi 96%, pada tahun 2018 tidak terlaksana, dan pada tahun 2019 hanya mencapai 27,7%. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pada tahun 2017 mencapai realisasi 90,7% dan mengalami penurunan dengan realisasi pada tahun 2018 mencapai 89%, dan pada tahun 2019 tidak terlaksana.

Menurut Abdul Halim (2016) mengatakan bahwa penyerapan anggaran yang realisasinya rendah akan berpengaruh terhadap kerugian ekonomi, dimana apabila pertumbuhan ekonomi nasional rendah maka keuangan negara yang sudah dialokasikan untuk daerah dengan tujuan pembangunan nasional tidak sesuai dengan yang diharapkan kemudian anggaran yang dikeluarkan menjadi tidak tepat. Anggaran daerah yang dijadikan sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah daerah dibutuhkan demi kesinambungan ekonomi dan penunjang daripada pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah. Anggaran juga merupakan hal penting untuk pemerintah daerah sebagai arah pembangunan, keselarasan, serta upaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Berdasarkan fenomena penyerapan anggaran belanja langsung pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang belum maksimal 100% yakni terlihat dari adanya peningkatan dan penurunan realisasi anggaran serta beberapa program yang tidak terlaksana setiap tahunnya. Beberapa masalah yang didapatkan berdasarkan prasarvei atau wawancara pendahuluan dimana terdapat sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam pengelolaan anggaran, revisi-revisi dalam anggaran yang menjadi keluhan dari masyarakat Kecamatan Bekasi Utara. Hal tersebut meyakinkan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PADA KECAMATAN BEKASI UTARA TAHUN 2017-2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik identifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Belum optimalnya penyerapan anggaran belanja langsung, terlihat dari realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar 84,16%, realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar 89,63%, dan realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar 87,58%.
2. Sumber daya manusia atau ASN yang kurang kompeten dalam penyerapan anggaran.
3. Beberapa program atau kegiatan yang tidak teralisasi setiap tahun.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perencanaan anggaran belanja langsung pada Kecamatan Bekasi Utara tahun 2017-2019?
2. Bagaimana proses pembahasan anggaran belanja langsung pada Kecamatan Bekasi Utara tahun 2017-2019?
3. Bagaimana proses tender pada Kecamatan Bekasi Utara tahun 2017-2019?
4. Bagaimana rasa takut penggunaan anggaran belanja langsung pada Kecamatan Bekasi Utara tahun 2017-2019?
5. Bagaimana pelaksanaan penyerapan anggaran belanja langsung pada Kecamatan Bekasi Utara tahun 2017-2019?
6. Bagaimana upaya meminimalisir hambatan penyerapan anggaran belanja langsung pada Kecamatan Bekasi Utara tahun 2017-2019?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perencanaan anggaran belanja langsung pada Kecamatan Bekasi Utara tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui proses pembahsan anggaran belanja langsung pada Kecamatan Bekasi Utara tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui proses tender pada Kecamatan Bekasi Utara tahun 2017-2019.
4. Untuk mengetahui penggunaan anggaran belanja langsung pada Kecamatan Bekasi Utara tahun 2017-2019.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menghasilkan beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan konsep ataupun teori pemerintahan khususnya terhadap penyerapan anggaran belanja langsung pada Kecamatan Bekasi Utara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

- 1) Menambah pengetahuan serta wawasan untuk penulis, dalam upaya menerapkan hasil pembelajaran mengenai faktor yang mendukung dan menghambat dalam mempengaruhi penyerapan anggaran dalam melakukan penelitian.
- 2) Memenuhi salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sidang Munaqosah Strata satu (S1) pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universtitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti lain yang akan menindak lanjuti penelitian ini dengan mengambil penelitian yang sama dengan analisa yang lebih baik.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan evaluasi bagi instansi pemerintah Kecamatan Bekasi Utara untuk meningkatkan perfoma dalam peningkatan penyerapan anggaran.

F. Kerangka Pemikiran

Konsep kerangka pemikiran yang peneliti gunakan adalah konsep segitiga terbalik atau dengan menggunakan pemikiran dari umum ke khusus. Konsep ini dimulai dari *Grand Theory* yaitu administrasi publik, *Middle Theory* yaitu anggaran dan *Operasional Theory* yaitu penyerapan anggaran.

Adapun teori yang dipakai dalam *Grand Theory* adalah teori administrasi public yang merupakan administrasi yang memiliki target tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Administrasi public mempelajari tiga elemen kehidupan bernegara yang meliputi legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta segala hal yang berkaitan dengan public. Kajian administrasi publik, antara lain: a. kebijakan publik, b. manajemen publik, c. keuangan negara, d. administrasi pembangunan, e. otonomi daerah, f. hubungan eksekutif dan legislative, g. etika administrasi publik, h. pelayanan publik, i. manajemen sumber daya manusia sektor publik, j. *good governance* dan *local governance* (Anggara, 2015a).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini termasuk pada kajian keuangan negara. Adapun keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing. Pencapaian tujuan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, tanpa

keuangan negara tujuan negara tidak dapat terselenggara sehingga hanya berupa cita-cita hukum (Anggara, 2016).

Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang berkenaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, tata usaha, pelaporan, pertanggungjawaban sampai pengawasan anggaran. Menyangkut terkait pengelolaan APBD, tentang bagaimana daerah dapat mengelola dilihat dari penerimaan maupun pengeluaran. Pada tahap perencanaan dan penganggaran adalah proses yang harus diperhatikan dalam penyerapan anggaran, sebab dapat menentukan tujuan yang akan diwujudkan serta tahapan cara untuk merealisasinya. Perencanaan yang lemah akan berpengaruh kepada tingkat penyerapan anggaran di unit kerja pemerintah.

Keuangan daerah adalah otoritas daerah untuk mengelola keuangannya berupa uang maupun barang yang dapat dinilai oleh uang yang menjadi hak dan kewajiban daerah. Oleh karena itu, harus dimaksimalkan dalam pemanfaatan untuk kemajuan serta pembangunan daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional dengan penyerapan anggaran yang baik.

Middle Theory yaitu teori anggaran yang merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran realisasi finansial.

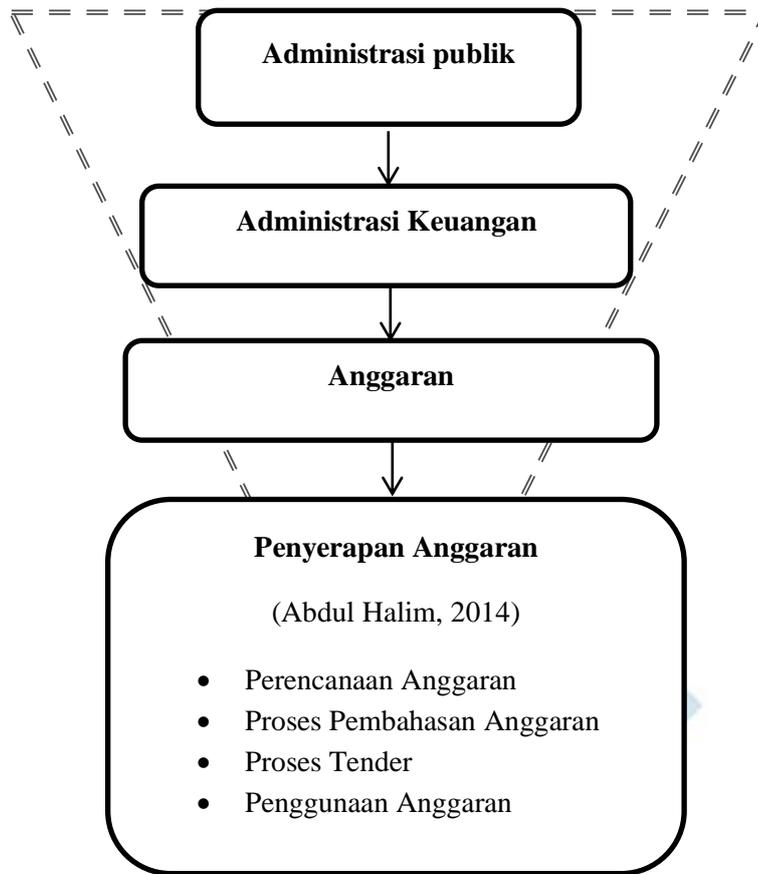
Operasional Theory yaitu menurut Abdul Halim yang menyebutkan penyerapan anggaran merupakan suatu realisasi dari anggaran yang telah diagendakan pada satu tahun periode. penulisan ini berfokus pada pelaksanaan efisiensi anggaran belanja langsung sebagai bentuk penyerapan anggaran belanja pada Kecamatan Bekasi Utara. Pada pembahasan administrasi publik, pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan, kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta

pembangunan daerah. Laporan realisasi anggaran merupakan hasil akhir dari kewajiban instansi terhadap penyerapan anggaran daerah.

Pemilihan teori Abdul Halim sebagai *operasional theory* untuk digunakan dalam penelitian ini relevan dengan kondisi fenomena ataupun gejala sosial yang ditemukan oleh peneliti pada proses prasurvei. Dimensi dapat dipakai untuk menjelaskan kondisi yang terjadi secara mendalam, detail dengan setting yang alami. Juga untuk meneukan solusi yang teat dalam pemecahan masalah.



Berikut merupakan Kerangka pemikiran dari kajian teori yang akan digunakan :



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

UNIVERSITAS ISLAM INESHER
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG